



Beasiswa Negara, Identitas Nasional dan Ketidaknyamanan Moral: Perspektif Politik Pendidikan Atas Kasus Dwi Sasetyaningtyas

Ahmad Zaky Mubarak*, Arifa Halwa Khairunnisa, Arnis Desgita Eka Putri, Aulia Putri Maharani, Gladis Kartika Dewi, Nabila Putri Sammanda, Nasywa Nurul Aini, Zelfanya Rahmayantari, Abdul Ghofur

Ilmu Politik, FISIP UPN "Veteran" Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran program beasiswa negara LPDP sebagai instrumen politik pendidikan yang membentuk identitas nasional dan ekspektasi moral penerimanya. Menggunakan pendekatan kualitatif kritis dan studi kasus Dwi Sasetyaningtyas (2026), penelitian ini mengkaji ketegangan antara pemenuhan kewajiban administratif dan tuntutan moral publik yang terus berkembang. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kajian literatur, dan analisis media, kemudian diinterpretasikan menggunakan konsep hegemoni Antonio Gramsci dan teori kewarganegaraan moral Willem Schinkel. Temuan menunjukkan bahwa beasiswa negara menciptakan "kontrak moral" yang melampaui kewajiban hukum, di mana negara dan masyarakat secara kolektif mendefinisikan dan menegakkan standar identitas nasional. Kasus Dwi Sasetyaningtyas memperlihatkan bahwa meskipun seluruh kewajiban formal telah terpenuhi, penerima beasiswa tetap terikat oleh ekspektasi moral terbuka yang sewaktu-waktu dapat diperketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LPDP tidak sekadar berperan sebagai kebijakan kesejahteraan pendidikan, melainkan sebagai mekanisme hegemonik pembentukan warga negara ideal, yang memunculkan pertanyaan kritis tentang batas kewenangan negara dalam membentuk identitas moral warganya.

Kata Kunci: Hegemoni; Identitas Nasional; Kewarganegaraan Moral; Beasiswa LPDP; Politik Pendidikan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4164>

*Correspondence: Ahmad Zaky Mubarak

Email:

2410413054@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 30-03-2026

Accepted: 30-04-2026

Published: 30-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the role of the LPDP state scholarship program as an instrument of educational politics that shapes national identity and moral expectations of its recipients. Using a critical qualitative approach and a case study of Dwi Sasetyaningtyas (2026), this research examines the tension between fulfilling administrative obligations and responding to evolving public moral demands. Data were collected through documentation studies, literature reviews, and media analysis, then interpreted using Antonio Gramsci's concept of hegemony and Willem Schinkel's theory of moral citizenship. The findings reveal that state scholarships create a "moral contract" that extends beyond legal obligations, with both the state and society collectively defining and enforcing standards of national identity. The case of Dwi Sasetyaningtyas demonstrates that even after all formal obligations are fulfilled, recipients remain bound by open-ended moral expectations that can be tightened at any time. This study concludes that LPDP functions not merely as an educational welfare policy but as a hegemonic mechanism through which the state constructs the ideal citizen, raising critical questions about the boundaries of state authority in shaping its citizens' moral identities.

Keywords: Educational Politics; Hegemony; LPDP Scholarship; Moral Citizenship; National Identity

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan beasiswa yang disponsori pemerintah telah diakui secara luas sebagai instrumen strategis dalam pengembangan modal manusia di tingkat nasional. Program-program ini didasarkan pada ekspektasi bahwa lulusan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memicu inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan negara asal mereka ([Jonbekova, 2023](#)). Logika strategis tersebut tercermin secara konkret dalam program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Indonesia, yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus mendorong penerima untuk berkontribusi pada pembangunan nasional ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023](#)). Melalui narasi "kembali dan mengabdikan" yang diinstitusionalisasi dalam proses seleksi, kontrak administratif, dan komunitas alumni, program ini tidak hanya mendistribusikan kesempatan belajar, tetapi juga menanamkan orientasi nilai yang secara aktif membentuk pemahaman penerima beasiswa mengenai relasi mereka dengan negara.

Relasi normatif antara negara dan penerima beasiswa menjadi bahan diskursus publik yang intens pada Februari 2026, ketika seorang alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang dikenal sebagai konten kreator di media sosial, mengunggah sebuah video di *platform* Threads. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan momen *unboxing* surat resmi dari otoritas Inggris (*Home Office*) yang berisi pengesahan kewarganegaraan anak keduanya sebagai warga negara Inggris. Narasi yang menyertai video tersebut menjadi titik awal kontroversi besar, yaitu "I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu" ([BBC Indonesia, 2026](#)).

Pernyataan tersebut memicu reaksi publik yang masif dan berkembang di berbagai platform digital seperti Instagram, Threads, dan X (Twitter). Gelombang kecaman awalnya berfokus pada narasi Dwi mengenai kewarganegaraan anaknya, namun dengan cepat beralih menjadi kritik terhadap statusnya sebagai mantan penerima beasiswa negara. Warganet menelusuri latar belakang Dwi dan menemukan bahwa ia adalah lulusan ITB serta penerima beasiswa LPDP untuk studi magister di Delft University of Technology, Belanda. Selain itu, ditemukan bahwa suaminya, Arya Iwantoro, juga menerima beasiswa LPDP untuk studi doktoral di Belanda, namun belum menuntaskan kewajiban pengabdian (2n+1) setelah memilih berkarier di Inggris. Temuan ini memperkeruh situasi, sehingga kontroversi bergeser dari opini pribadi menjadi isu kepatuhan terhadap kontrak beasiswa negara dan loyalitas kepada negara.

Eskalasi kasus ini melampaui ruang digital. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagai institusi yang menaungi LPDP, mengambil langkah resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menjatuhkan sanksi *blacklist* permanen terhadap keduanya dari seluruh instansi pemerintah, disertai pernyataan bernuansa moral: "jangan menghina negara Anda sendiri" ([CNN Indonesia, 2026](#)). Pada saat yang sama, LPDP menyatakan penyesalan atas sikap Dwi yang dinilai tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang diharapkan dari alumni ([Tempo.co, 2026](#)), serta menuntut Arya Iwantoro mengembalikan dana beasiswa beserta bunga ke kas negara ([Suara.com, 2026](#)). Menanggapi tekanan tersebut, Dwi menghapus video yang dimaksud dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dalam klarifikasinya, Dwi menegaskan bahwa ia telah menuntaskan seluruh kewajiban pengabdian selama enam tahun, terhitung

dari 2017 hingga 2023 ([Suara.com, 2026](#)). Namun, permintaan maaf tersebut tidak cukup untuk meredam narasi yang berkembang; framing "kacang lupa kulit" yang mendominasi diskursus digital ([Inilah.com, 2026](#)) menunjukkan bahwa publik memandang persoalan ini sebagai kegagalan moral, bukan sekadar kesalahan individual yang dapat diselesaikan dengan permintaan maaf.

Kasus ini menarik perhatian tidak hanya karena viralitasnya, tetapi juga karena mengekspos ketegangan yang lebih dalam antara kewajiban administratif yang terukur dan terbatas di satu sisi, serta ekspektasi moral yang cair, tidak memiliki batas waktu, dan dapat diperketat sewaktu-waktu di sisi lain. Dinamika ini, sebagaimana dijelaskan oleh Foucault (1991) melalui konsep *governmentality*, yang menggambarkan bagaimana negara mengarahkan perilaku individu tidak hanya melalui kontrol langsung, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Untuk memahami mengapa ekspektasi semacam itu sangat kuat berakar, penting untuk terlebih dahulu memahami bagaimana identitas nasional dikonstruksi. Anderson (2006) mendefinisikan bangsa sebagai *imagined community* yang dibangun melalui proses historis, simbolik, dan institusional, bukan terbentuk secara alamiah. Dalam konteks ini, identitas nasional diproduksi dan direproduksi secara aktif melalui instrumen negara, termasuk pendidikan ([Hamdani et al., 2022](#)). Dalam kerangka yang sama, beasiswa negara bukan sekadar kebijakan kesejahteraan, melainkan instrumen strategis yang digunakan negara untuk membentuk sumber daya manusia yang selaras dengan proyek kebangsaan. Relasi kuasa juga tersirat di dalamnya, negara tidak hanya "memberi", tetapi juga "mengarahkan" ([Marginson, 2016](#)). Program LPDP, melalui narasi pengabdian yang menjadi inti programnya, menetapkan kewajiban administratif sekaligus membangun ekspektasi moral bagi penerima beasiswa. Konsep ini sejalan dengan gagasan moral citizenship dari Schinkel (2010), di mana warga negara diharapkan tidak hanya taat hukum, tetapi juga memenuhi standar moral tertentu yang ditentukan secara sosial dan politik.

Kajian-kajian sebelumnya telah membahas sebagian persoalan ini, namun belum ada yang mengintegrasikannya secara menyeluruh. Marginson (2024) menyoroti bagaimana pendidikan tinggi membentuk kesadaran sosial dan tidak pernah sepenuhnya netral dari kepentingan kekuasaan, namun belum secara khusus mengkaji apa yang terjadi ketika kepentingan pribadi penerima beasiswa berbenturan dengan ekspektasi negara di ruang publik. Sementara itu, Schinkel (2010) menawarkan kerangka relevan tentang pergeseran kewarganegaraan dari status administratif ke penilaian moral, namun kajiannya berfokus pada konteks Eropa Barat dan belum dikaitkan langsung dengan dinamika kebijakan beasiswa negara. Brown dan Tannock (2009) serta Mosneaga dan Agergaard (2012) menemukan bahwa penerima beasiswa sering diposisikan sebagai aset strategis negara dalam persaingan global, tetapi fokus mereka lebih pada dimensi ekonomi-politik internasional daripada mekanisme moral yang bekerja di ruang publik domestik. Rizvi (2011) menambahkan bahwa mobilitas akademik dapat menciptakan identitas transnasional yang kadang bertentangan dengan identitas nasional, sebuah ketegangan yang sangat relevan dengan kasus ini, namun kajiannya tidak membahas bagaimana negara dan masyarakat merespons ketegangan tersebut secara kolektif. Sebaliknya, kajian tentang beasiswa negara di Indonesia cenderung terfokus pada efektivitas program dalam meningkatkan akses pendidikan ([Rahawarin et al., 2025](#)) dan hampir tidak membahas

dimensi simbolik, moral, maupun politis di balik program tersebut. Dengan demikian, literatur yang ada secara terpisah-pisah membahas aspek hegemoni, kewarganegaraan moral, atau internasionalisasi pendidikan, tetapi belum ada yang mengintegrasikan ketiganya untuk menjelaskan bagaimana beasiswa negara menciptakan "kontrak moral" yang melampaui batas kewajiban formal, khususnya dalam konteks Indonesia.

Untuk memahami dinamika tersebut secara menyeluruh, penelitian ini berada pada irisan tiga bidang kajian yang saling memperkuat: studi pendidikan, nasionalisme, dan kewarganegaraan digital. Kebijakan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Torres (2009), tidak pernah benar-benar netral dari kepentingan negara, melainkan selalu tertanam dalam relasi kuasa yang lebih luas. Dalam dimensi nasionalisme, identitas kebangsaan tidak hanya direproduksi melalui momen-momen besar, tetapi juga melalui praktik institusional sehari-hari yang secara halus menetapkan batas antara warga yang dianggap setia dan yang dianggap menyimpang dari nilai kolektif ([Skey, 2011](#)). Adapun perkembangan ruang digital telah menambah lapisan baru dalam dinamika ini: media sosial mentransformasi cara publik mengawasi dan menghakimi perilaku individu, sehingga ekspresi pribadi pun dapat dalam sekejap berubah menjadi objek pengadilan moral kolektif ([Chouliaraki & Georgiou, 2022](#)). Ketiga dimensi inilah yang membuat kasus LPDP penting dibaca sebagai fenomena politik budaya dan bukan sekadar persoalan administratif, karena ia adalah titik temu antara mekanisme negara dalam membentuk identitas, struktur moral masyarakat, dan dinamika pengawasan di era digital.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana program beasiswa negara, khususnya LPDP, berfungsi sebagai instrumen politik pendidikan dalam membentuk identitas nasional penerimanya? Kedua, bagaimana ketegangan antara kewajiban administratif dan ekspektasi moral termanifestasi dalam kasus Dwi Sasetyaningtyas, serta apa implikasinya bagi pemahaman tentang relasi negara dan warga negara di Indonesia kontemporer? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan konsep hegemoni Antonio Gramsci (1971) dan *moral citizenship* Willem Schinkel (2010) sebagai kerangka analisis. Sintesis kedua konsep ini merupakan kontribusi utama penelitian ini: alih-alih memandang beasiswa hanya sebagai kontrak birokrasi, kajian ini menunjukkan bahwa beasiswa negara menciptakan "kontrak moral" yang mengikat penerima dalam struktur hegemoni, tanpa batas waktu yang jelas, dapat diperketat sewaktu-waktu, dan menjadikan ekspresi personal sebagai objek penilaian kolektif. Kasus Dwi Sasetyaningtyas merupakan ekspresi paling nyata dari kontrak moral tersebut dan menjadi titik berangkat empiris kajian ini.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kritis karena bertujuan untuk memahami sekaligus menginterpretasikan makna di balik fenomena sosial yang terjadi, terutama terkait relasi kuasa, konstruksi identitas, dan ekspektasi moral yang dihasilkan melalui kebijakan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengkritisi bagaimana negara membentuk dan mereproduksi nilai serta norma yang kemudian diinternalisasi oleh masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada satu kasus spesifik, yaitu fenomena Dwi Sasetyaningtyas, yang dipandang mampu merefleksikan dinamika yang lebih luas dalam konteks kebijakan beasiswa negara di Indonesia. Melalui studi kasus, penelitian ini dapat menggali fenomena secara mendalam (*in-depth*) serta memahami konteks sosial, politik, dan moral yang melatarbelakangi munculnya ketegangan antara kewajiban administratif dan ekspektasi sosial.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara. Pertama, studi dokumentasi yaitu mengkaji kebijakan resmi terkait beasiswa negara, khususnya LPDP, serta berbagai regulasi yang mengatur kewajiban penerima beasiswa. Kedua, studi literatur dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan untuk memperkuat kerangka konseptual penelitian. Ketiga, analisis media digunakan untuk mengamati bagaimana kasus Dwi Sasetyaningtyas dibingkai dalam pemberitaan serta bagaimana opini publik terbentuk, baik melalui media online maupun media sosial, sehingga dapat menangkap dinamika ekspektasi moral yang berkembang di ruang publik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif-kritis. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti identitas nasional, kewajiban administratif, dan ekspektasi moral. Data tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci dan konsep kewarganegaraan moral Willem Schinkel untuk mengungkap bagaimana relasi kuasa bekerja dalam kebijakan beasiswa negara.

Hasil dan Pembahasan

Beasiswa Negara sebagai Instrumen Politik Pendidikan dalam Pembentukan Identitas Nasional

Beasiswa negara, khususnya LPDP, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung akses pendidikan, tetapi juga sebagai alat strategis negara dalam membentuk ideologi, identitas, dan orientasi nilai warga negara. Untuk memperdalam pemahaman, penting untuk menelaah peran beasiswa negara dari tiga dimensi utama: dimensi ideologis, dimensi sosial-politik, dan dimensi kebijakan publik.

Pada dimensi ideologis, LPDP secara sadar menanamkan narasi pengabdian kepada bangsa dan negara pada setiap tahapan programnya. Melalui slogan, pelatihan, dan komunitas alumni, negara membentuk konsepsi ideal tentang "warga negara berprestasi" yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga loyal secara moral. Internalisasi nilai-nilai ini berlangsung melalui berbagai mekanisme, mulai dari proses seleksi, penandatanganan kontrak administratif, hingga pembentukan ekosistem alumni. Hal ini sejalan dengan konsep "intelektual organik" Gramsci, di mana kelompok terdidik didorong untuk menjadi agen perubahan sosial yang berpihak pada kepentingan negara.

Pada dimensi sosial-politik, beasiswa negara menjadi arena produksi dan reproduksi identitas nasional. Setiap penerima beasiswa membawa ekspektasi kolektif untuk menjadi representasi ideal bangsa Indonesia, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Identitas nasional yang dikonstruksi melalui beasiswa bukan sekadar status administratif, melainkan identitas simbolik yang sarat makna moral, sebagaimana dijelaskan Anderson melalui konsep *imagined community*. Negara, melalui LPDP, secara aktif mendefinisikan

siapa yang layak menjadi simbol bangsa, sehingga batas antara ranah privat dan publik menjadi kabur.

Pada dimensi kebijakan publik, LPDP mewajibkan penerima beasiswa untuk memenuhi masa pengabdian sebagai bentuk timbal balik kepada negara. Namun, lebih dari itu, kebijakan ini membangun narasi tentang "utang moral" yang harus dibayar dengan loyalitas sepanjang hayat. Hal ini menyebabkan setiap tindakan pribadi penerima beasiswa, mulai dari pilihan pekerjaan hingga keputusan keluarga, menjadi objek penilaian moral oleh negara dan publik. Dengan demikian, beasiswa negara berfungsi sebagai instrumen pembentukan identitas nasional melalui hegemoni nilai dan moralitas yang diproduksi negara dan direproduksi masyarakat.

Selain itu, kasus-kasus internasional menunjukkan pola serupa, misalnya Chevening di Inggris dan Fulbright di Amerika Serikat, di mana penerima beasiswa diharapkan menjadi duta bangsa dan membawa nilai-nilai negara asal. Namun, di Indonesia, tekanan moral cenderung lebih kuat dan berkelanjutan, akibat kuatnya narasi nasionalisme dan solidaritas komunitas. Studi perbandingan ini memperlihatkan bahwa beasiswa negara tidak hanya memfasilitasi mobilitas sosial, tetapi juga memperkuat kontrol simbolik negara atas warga terdidiknya.

Beasiswa negara sebaiknya tidak dipahami secara sempit sebagai kebijakan kesejahteraan atau bantuan finansial semata. Dalam perspektif politik pendidikan, beasiswa berfungsi sebagai instrumen strategis yang digunakan negara untuk membentuk orientasi nilai, kesadaran kolektif, dan identitas nasional para penerimanya. Program LPDP, sebagai lembaga pengelola dana abadi pendidikan yang dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung pembiayaan beasiswa bagi pelajar Indonesia ([Dealls, 2026](#)), tidak hanya mendistribusikan kesempatan belajar, tetapi juga menanamkan orientasi yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Pembiayaan ini merealisasikan amanat UUD 1945 yang menetapkan alokasi minimal dua puluh persen APBN untuk fungsi pendidikan dan dalam pelaksanaannya LPDP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional ([LPDP, 2010](#)).

Dimensi ideologis beasiswa negara paling jelas tercermin melalui narasi yang dibangun dalam program tersebut. Slogan seperti "pengabdian", "kontribusi untuk Indonesia", dan "kembali ke tanah air" tidak hanya berfungsi sebagai promosi, tetapi juga sebagai perangkat ideologis yang membentuk cara pandang penerima terhadap hubungan mereka dengan negara. Dalam kerangka teori hegemoni, mekanisme ini dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memperoleh kepemimpinan moral dan intelektual atas kelompok terdidik. Hegemoni tercapai ketika cara pandang yang diproduksi oleh kelompok dominan diterima oleh masyarakat sebagai *common sense*, sehingga tidak lagi dirasakan sebagai bentuk dominasi. Individu tidak merasa dipaksa, melainkan secara sukarela mengadopsi nilai yang sebenarnya merupakan konstruksi kekuasaan ([Gramsci, 1971](#)).

Mekanisme hegemoni dalam program beasiswa berjalan melalui dua jalur yang saling melengkapi. Jalur pertama terlihat dalam proses seleksi dan kontrak administratif yang secara eksplisit menanamkan ekspektasi pengabdian; sebelum keberangkatan, penerima beasiswa diwajibkan menandatangani kontrak berisi kewajiban masa pengabdian

$2n+1$, yaitu dua kali masa studi ditambah satu tahun, sebagai bentuk timbal balik atas investasi negara. Jalur kedua, yang lebih subtil, muncul melalui internalisasi nilai melalui orientasi, pelatihan, dan komunitas alumni yang diinisiasi LPDP. Kedua jalur ini secara bersamaan membentuk subjek beasiswa, sehingga individu terikat kepada negara tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral.

Lebih jauh, beasiswa negara berfungsi memproduksi apa yang disebut Gramsci sebagai "intelektual organik", yaitu kelompok terdidik yang mereproduksi nilai dominan dalam masyarakat ([Gramsci, 1971](#)). Penerima beasiswa diposisikan tidak hanya sebagai individu berprestasi, tetapi juga sebagai agen simbolik negara yang diharapkan membawa dan menyebarkan nilai kebangsaan. Proses ini menentukan siapa yang dikonstruksikan sebagai "warga negara ideal", yaitu individu yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menunjukkan loyalitas dan komitmen terhadap proyek kebangsaan.

Konstruksi simbolik ini berkaitan erat dengan gagasan *imagined community* dari Benedict Anderson (2006). Anderson mendefinisikan bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan melalui proses historis, simbolik, dan institusional. Identitas nasional tidak muncul secara alamiah, melainkan diproduksi dan direproduksi secara aktif melalui instrumen negara, termasuk pendidikan. Dalam kerangka ini, beasiswa negara berfungsi sebagai mekanisme institusional yang tidak hanya mendistribusikan kesempatan, tetapi juga membentuk makna mengenai siapa yang layak merepresentasikan bangsa. Penerima beasiswa diposisikan sebagai figur simbolik yang menanggung ekspektasi kolektif dari negara dan publik.

Proses pembentukan identitas nasional melalui beasiswa juga menyebabkan batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi kabur. Ketika individu diposisikan sebagai representasi bangsa, setiap pilihan personal, mulai dari tempat tinggal hingga kewarganegaraan keluarga cenderung diinterpretasikan dalam kerangka kepentingan kolektif. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan selalu membawa dimensi sosial dan politik yang lebih luas (Marginson, 2024). Akibatnya, penerima beasiswa menjadi rentan terhadap penilaian publik, terutama ketika pilihan personal dianggap bertentangan dengan nilai kebangsaan yang telah diinternalisasi.

Kerentanan ini menjadi nyata dalam kasus yang melibatkan Dwi Sasetyaningtyas, selanjutnya disebut Tyas, pada Februari 2026. Pada bulan itu, Tyas mengunggah video unboxing di Threads, memperlihatkan paspor anaknya sebagai warga negara Inggris, disertai narasi: "I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu." Unggahan tersebut memicu gelombang reaksi publik masif. Ketika publik menelusuri latar belakang Tyas, mereka menemukan bahwa ia lulusan ITB dan menempuh studi S2 di Delft University of Technology, Belanda, dengan beasiswa LPDP. Situasi semakin runyam karena suami Tyas, Arya Iwantoro, juga penerima beasiswa LPDP untuk jenjang PhD di Belanda, namun belum menuntaskan kewajiban $2n+1$ -nya dan memilih berkarier sebagai peneliti di Inggris ([Tempo.co, 2026](#)).

Respons yang muncul tidak terbatas pada kritik informal di ruang digital. Kementerian Keuangan, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan keduanya ke dalam daftar hitam (blacklist) permanen, yang berarti mereka tidak akan dapat menjalin kerja sama atau hubungan profesional dengan instansi pemerintah. Selain

itu, LPDP juga meminta Arya untuk mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya ke kas negara ([CNN Indonesia, 2026](#)). Respons institusional yang tegas ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai penegak kontrak hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan identitas nasional.

Fenomena ini menegaskan bahwa beasiswa negara berfungsi sebagai mekanisme hegemonik yang secara implisit memproduksi ekspektasi moral. Nilai-nilai seperti pengabdian, kontribusi, dan loyalitas awalnya diinternalisasi melalui kontrak dan seleksi, namun kemudian berkembang menjadi *common sense* yang tidak hanya diterima oleh individu, tetapi juga direproduksi oleh masyarakat sebagai standar kolektif. Status penerima beasiswa negara kini melampaui identitas administratif dan telah menjadi identitas normatif yang sarat muatan moral.

Ketegangan antara Kewajiban Administratif dan Ekspektasi Moral Penerima Beasiswa: Analisis Kasus Dwi Sasetyaningtyas

Kasus Dwi Sasetyaningtyas (Tyas) secara nyata memperlihatkan bahwa ketegangan antara kewajiban administratif dan ekspektasi moral tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif dan sistemik. Untuk memahami kompleksitas fenomena ini, perlu dianalisis beberapa aspek kunci: dinamika ruang publik, mekanisme pengawasan moral, serta peran negara dan masyarakat dalam reproduksi ekspektasi moral terhadap penerima beasiswa.

Pertama, dalam kerangka ruang publik Habermas, tindakan Tyas menjadi objek diskursus massal yang melibatkan aktor negara, media, dan warga digital. Media sosial memperkuat difusi opini, memungkinkan narasi moral berkembang pesat dan membentuk tekanan kolektif. Kasus Tyas menunjukkan bahwa reputasi penerima beasiswa sangat rentan terhadap interpretasi publik, di mana batas antara privasi dan kewajiban sosial menjadi semakin kabur. Pengadilan moral di ruang digital sering kali lebih kuat daripada sanksi formal negara, sehingga penerima beasiswa harus menanggung beban ganda, yaitu tuntutan administratif dan ekspektasi moral yang tidak pernah jelas batasnya.

Kedua, mekanisme pengawasan moral bekerja tidak hanya secara *top-down* melalui negara, tetapi juga secara *bottom-up* oleh masyarakat. Publik berperan sebagai penjaga dan penegak standar moral penerima beasiswa, seperti terlihat dalam gelombang kecaman yang dialami Tyas. Fenomena ini sejalan dengan konsep *moral economy* Thompson, di mana masyarakat menetapkan standar keadilan dan kepatutan sendiri yang sering kali melampaui aturan formal. Dalam kasus Tyas, ekspresi personal di ruang digital dapat dianggap sebagai kegagalan moral kolektif, sehingga memicu sanksi sosial dan administratif secara bersamaan.

Ketiga, negara memperkuat ekspektasi moral melalui sanksi simbolik, seperti blacklist dan tuntutan pengembalian dana, yang tidak sepenuhnya didasarkan pada pelanggaran administratif. Negara, dalam hal ini, bertindak tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga moral kolektif. Hal ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang asimetris, di mana penerima beasiswa tidak pernah sepenuhnya bebas dari pengawasan, bahkan setelah kewajiban kontraktual selesai.

Studi perbandingan dengan negara seperti Australia, Inggris, dan Jerman menunjukkan variasi dalam penegakan ekspektasi moral. Di beberapa negara, kontrak

administratif lebih ditekankan, sementara di Indonesia ekspektasi moral dan simbolik cenderung lebih dominan. Hal ini dipengaruhi oleh budaya kolektivisme dan nasionalisme yang kuat dalam masyarakat Indonesia, sehingga beasiswa negara menjadi arena pembentukan identitas moral yang sangat intens.

Dengan demikian, ketegangan antara kewajiban administratif dan ekspektasi moral dalam kasus Tyas merefleksikan dinamika sosial-politik yang lebih luas, di mana negara dan masyarakat bersama-sama membangun serta menegakkan standar moral penerima beasiswa. Fenomena ini menandai pergeseran penting dalam paradigma kewarganegaraan di Indonesia, dari sekadar pemenuhan kontrak hukum menuju performa moral yang selalu dinilai secara kolektif dan dinamis.

Analisis kasus Dwi Sasetyaningtyas tidak dapat dimulai dari aspek pelanggaran aturan. Secara administratif, Tyas telah memenuhi seluruh kewajibannya. Dalam klarifikasi tertulis kepada publik, Tyas menyatakan bahwa ia telah menuntaskan kewajiban pengabdian selama enam tahun, terhitung sejak 2017 hingga 2023, setelah menyelesaikan studi S2 (Suara.com, 2026). Dengan demikian, pertanyaan analitis yang mendasar bukanlah apakah Tyas bersalah secara hukum, melainkan mengapa kewajiban formal tersebut tidak cukup melindunginya dari sanksi sosial maupun administratif negara.

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat ditemukan melalui konsep kewarganegaraan moral yang dikembangkan oleh Schinkel (2010). Konsep ini didasarkan pada pengamatan bahwa penilaian terhadap seseorang sebagai warga negara yang "baik" tidak lagi hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap kewajiban legal, melainkan pada sejauh mana individu tersebut menampilkan sikap moral yang dianggap layak di ruang publik. Schinkel menyebut fenomena ini sebagai virtualisasi kewarganegaraan, yaitu pergeseran di mana legitimasi seseorang sebagai warga negara semakin ditentukan oleh performa moral di ruang publik, bukan oleh status hukum formal.

Pergeseran dari kewarganegaraan legal menuju kewarganegaraan moral menghasilkan konsekuensi signifikan, yaitu tuntutan terhadap individu tidak pernah benar-benar selesai. Tidak ada titik di mana seseorang dapat dinyatakan "telah cukup" membuktikan loyalitas kepada bangsa. Kontrak formal mungkin memiliki tanggal berakhir, tetapi kontrak moral bersifat terbuka dan dapat diperketat sewaktu-waktu. Hal ini menunjukkan bahwa moral citizenship selalu berfungsi sebagai perangkat pengeksklusian yang standarnya dapat diperketat sesuai kehendak, bahkan hingga menyentuh ranah ekspresi pribadi yang tidak diatur oleh hukum formal (Schinkel, 2010).

Dinamika ini terlihat jelas dalam kasus Tyas. Pernyataan "cukup aku yang WNI, anak-anakku jangan" tidak melanggar ketentuan hukum apa pun, baik dalam kontrak beasiswa LPDP maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pernyataan tersebut dipersepsikan publik sebagai kegagalan moral yang serius, yaitu kegagalan untuk menampilkan rasa syukur, loyalitas, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya dimiliki penerima beasiswa negara. Yang diadili bukan tindakan Tyas, melainkan ekspresi emosi dan sikapnya. Hal ini tercermin dari narasi yang mendominasi ruang digital, seperti framing "kacang lupa kulit" (Inilah.com, 2026), yang secara kolektif memosisikan Tyas sebagai individu yang gagal memenuhi standar moral, meskipun seluruh kewajiban administratifnya telah terpenuhi.

Kompleksitas analitis kasus ini meningkat karena negara turut berpartisipasi dalam penegakan standar moral, bukan hanya penegakan kontrak hukum. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menjatuhkan sanksi blacklist permanen tidak merujuk pada pelanggaran kontrak beasiswa, melainkan menggunakan framing moral: "Saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan... jangan menghina negara Anda sendiri" ([CNN Indonesia, 2026](#)). Demikian pula, pihak LPDP menyatakan menyayangkan sikap Tyas karena dinilai tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang diharapkan dari alumni LPDP ([Inilah.com, 2026](#)). Kedua pernyataan ini secara eksplisit memindahkan diskursus dari ranah hukum ke ranah moral, menegaskan bahwa negara berperan sebagai penjaga norma dan identitas nasional.

Kondisi ini menunjukkan fenomena *moralized citizenship* dalam praktik, yaitu situasi di mana publik bertindak sebagai pengawas moral yang menghakimi individu ketika mereka dianggap gagal menampilkan citra yang sesuai dengan ekspektasi kolektif. Dalam kasus penerima beasiswa negara, citra yang diharapkan adalah "penerima beasiswa yang berterima kasih", yaitu individu yang senantiasa memmanifestasikan rasa hutang budi kepada negara dalam setiap tindakan dan pernyataannya, bahkan setelah kewajiban formalnya berakhir.

Dinamika ini dapat dipahami lebih dalam melalui konsep *moral economy* yang dikembangkan oleh E. P. Thompson (1971). Thompson berpendapat bahwa masyarakat memiliki standar tersendiri mengenai apa yang dianggap adil, pantas, dan bermoral, yang tidak selalu identik dengan ketentuan formal negara ([Thompson, 1971](#)). Dalam konteks beasiswa negara, standar moral ekonomi masyarakat Indonesia menetapkan bahwa penerima beasiswa memiliki "utang moral" kepada negara dan rakyat yang harus dibayar tidak hanya melalui pengabdian formal, tetapi juga melalui sikap hidup yang konsisten mencerminkan kebanggaan dan loyalitas kebangsaan. Utang moral ini bersifat tidak terbatas waktu dan tidak dapat dilunasi sepenuhnya.

Lebih lanjut, ketegangan antara kewajiban administratif dan ekspektasi moral dalam kasus ini merupakan produk dari cara negara sendiri membangun narasi beasiswa. Ketika LPDP secara konsisten menggunakan bahasa pengabdian dan loyalitas, bukan sekadar bahasa kontrak dan investasi sebagai bagian dari identitas program, negara secara aktif membangun landasan bagi ekspektasi moral yang melampaui batas kewajiban hukum. Dalam kerangka Gramsci, hal ini konsisten dengan proyek hegemoni, yaitu ketika nilai-nilai yang dipromosikan negara telah diadopsi sebagai *common sense* oleh masyarakat, penegakan nilai tersebut tidak lagi sepenuhnya bergantung pada aparatus negara, melainkan masyarakat sendiri yang menjalankan fungsi pengawasan.

Sintesis antara konsep hegemoni Gramsci dan kewarganegaraan moral Schinkel memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika yang terjadi dalam kasus Tyas. Beasiswa negara tidak hanya menciptakan kontrak birokrasi yang bersifat sementara, tetapi juga kontrak moral yang mengikat penerima dalam struktur hegemoni negara. Kontrak moral ini tidak memiliki batas waktu yang jelas, dapat diperketat sewaktu-waktu, dan membuat setiap tindakan personal penerima beasiswa selalu berpotensi diukur dengan standar identitas nasional dan kepatutan sosial. Temuan ini memiliki implikasi luas bagi pemahaman tentang relasi negara dan warga negara dalam konteks Indonesia kontemporer, menunjukkan adanya asimetri mendasar antara kewajiban yang dapat

diukur dan dibatasi secara formal di satu sisi dan ekspektasi moral yang bersifat cair, tak terbatas, serta mudah dimanipulasi di sisi lain.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa program beasiswa LPDP tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen peningkatan akses pendidikan, melainkan juga sebagai mekanisme hegemonik yang secara aktif membentuk identitas nasional dan ekspektasi moral penerima beasiswa, melampaui batas kewajiban administratif yang tertuang dalam kontrak formal. Melalui narasi pengabdian dan loyalitas yang diinstitusionalisasi sejak proses seleksi hingga komunitas alumni, negara membangun “intelektual organik” yang diharapkan merepresentasikan nilai kebangsaan, sementara kasus Dwi Sasetyaningtyas secara empiris membuktikan bahwa pemenuhan seluruh kewajiban formal pun tidak cukup membebaskan penerima beasiswa dari tuntutan moral publik yang bersifat terbuka dan dapat diperketat sewaktu-waktu, sebuah manifestasi nyata dari konsep moral citizenship. Temuan ini memiliki implikasi penting: pertama, negara perlu mengevaluasi narasi program beasiswa agar tidak bergeser menjadi instrumen kontrol sosial yang mengancam kebebasan individu; kedua, para pengambil kebijakan perlu memberi perhatian serius pada dimensi kuasa dan moral dalam kebijakan pendidikan, tidak hanya pada efektivitas program semata; dan ketiga, kasus ini membuka ruang diskursus kritis tentang sejauh mana negara berwenang membentuk identitas moral warganya melalui kebijakan pendidikan dalam masyarakat demokratis. Untuk penelitian selanjutnya, kajian komparatif lintas negara tentang bagaimana program beasiswa serupa di Asia Tenggara mengelola ketegangan antara kewajiban formal dan ekspektasi moral akan memperkaya pemahaman tentang relasi negara-warga negara di era kewarganegaraan digital.

Referensi

- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. In *Verso* (Verso). Verso Books. <https://doi.org/1>.
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. In *Verso* (Verso). Verso Books. <https://doi.org/1>
- BBC Indonesia. (2026). *Polemik beasiswa LPDP “cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan” – Pembangkangan, penghinaan atau kegagalan sistemik?* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62015yzndno>
- Brown, P., & Tannock, S. (2009). Education, Meritocracy and the Global War for Talent. *Journal of Education Policy*, 24(4), 377–392. <https://doi.org/10.1080/02680930802669938>
- Chouliaraki, L., & Georgiou, M. (2022). *The Digital Border: Migration, Technology, Power*. New York University Press. <https://doi.org/10.18574/nyu/9781479810161.001.0001>
- CNN Indonesia. (2026). *Purbaya Blacklist Penerima LPDP Hina RI: Tidak Bisa Masuk Pemerintahan.* CNN INDONESIA.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260223130604-532-1330835/purbaya-blacklist-penerima-lpdp-hina-ri-tidak-bisa-masuk-pemerintahan>

Dealls. (2026). *Apa itu LPDP? Cek Syarat, Tahapan, & Cara Daftarnya*. Dealls.Com. <https://dealls.com/pengembangan-karir/lpdp-adalah>

Foucault, M. (1991). Governmentality. In Graham Burchell, Colin Gordon, & Peter Miller (Eds.), *THE FOUCAULT EFFECT STUDIES IN GOVERNMENTALITY* (1st ed., pp. 87–104). The University of Chicago Press.

Gramsci, A. (1971). *Selections From The Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith (eds.); cetak ulan). International Publisher.

Hamdani, A. D., Nurhafisah, N., & Silvia, S. (2022). Hamdani, A. D., Nurhafisah, N., & Silvia, S. (2022). *Jurnal Pendidikan Guru*, 3(3), 170–178.

Inilah.com. (2026). *Pesan Menohok Bos LPDP untuk Alumni “Kacang Lupa Kulit”: Ingat Lu Pakai Duit Pajak!* Inilah.Com. <https://www.inilah.com/pesan-menohok-bos-lpdp-untuk-alumni-kacang-lupa-kulit-ingat-lu-pakai-duit-pajak>

Jonbekova, D. (2023). Government scholarships for international higher education: pathways for social change in Kazakhstan. *Higher Education*, 87(3), 761–777. <https://doi.org/10.1007/s10734-023-01034-8>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *11 Years of LPDP: Enlivening Indonesia, Advancing The Nation Annual Report of LPDP, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia*. https://lpdp.kemenkeu.go.id/storage/information/report/file/yearly/yearly_report_en_1750064904.pdf

LPDP. (2010). *Selayang Pandang*. LPDP KEMENKEU. https://lpdp.kemenkeu.go.id/tentang/selayang-pandang/?utm_source=chatgpt.com

Marginson, S. (2016). *The Dream is Over: The Crisis of Clark Kerr’s California Idea Higher Education*. In *University California Press*. University of California Press. <https://doi.org/10.1118/1.2240115>

Marginson, S. (2024). *Higher Education and Public and Common Good* (114; Centre of Global Higher Education Working Paper Series, Issue 114).

Mosneaga, A., & Agergaard, J. (2012). Agents of internationalisation? Danish universities’ practices for attracting international students. *Globalisation, Societies and Education*, 10(4:), 219–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14767724.2012.690309>

- Rahawarin, B., Ahmad, M., Pendidikan, M., Jakarta, U. N., Inggris, P. B., & As-syafiiyah, U. I. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN DALAM MENGURANGI SISWA PUTUS SEKOLAH : *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(4), 1053–1067. <https://doi.org/https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i4.5883>
- Rizvi, F. (2011). Theorizing student mobility in an era of globalization. *Teachers and Teaching Theory and Practice*, 17(6), 693–701. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13540602.2011.625145>
- Schinkel, W. (2010). The Virtualization of Citizenship. *Critical Sociology*, 36(2), 265–283. <https://doi.org/10.1177/0896920509357506>
- Skey, M. (2011). *National Belonging and Everyday Life: The Significance of Nationhood in an Uncertain World*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230305991>
- Suara.com. (2026). *Biaya Kuliah Arya Iwantoro yang Dibiayai Negara, Kini Bakal Dikembalikan?* Suara.Com. <https://www.suara.com/bisnis/2026/02/24/135740/biaya-kuliah-arya-iwantoro-yang-dibiayai-negara-kini-bakal-dikembalikan>
- Tempo.co. (2026). *LPDP Duga Suami Dwi Belum Tunaikan Kontribusi Pascabeasiswa*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/lpdp-duga-suami-dwi-belum-tunaikan-kontribusi-pascabeasiswa-2116650>
- Thompson, E. P. (1971). *The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century*. *Past & Present*, 50, 76–136. <http://www.jstor.org/stable/650244>
- Torres, C. A. (2009). *Globalizations and Education: Collected Essays on Class, Race, Gender, and the State*. Teachers College Press.